



Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Mempersiapkan Produk Unggulan Wilayah Pedesaan Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Rumah

Village Government Policies in Preparing Superior Products of Rural Areas Through Optimization of the Utilization of Home Yard

Haryono*

Prodi Ekonomi Pembangunan, Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia

The aim of this study is following 1) to know the planning of the government policy of Jabaran village; 2) to understand participation of Jabaran's societies in utilizing their yard; 3) to find out the potential of the yard to support Jabaran's excellent products. The type of this study is qualitative descriptive by doing observation and interview deeply to some key informans for getting primery data. And the secondary data provided by the local government of Jabaran or official publications of Sidoarjo regency. The result of this study said that 1) the planning of local government policy of Jabaran to build the village related to UU No 6/2016 about village; 2) Participation of Jabaran's societies to exploit their yard to produce bordered plants and livestocks, and the real steps of the government of Jabaran collaborate to the university to cultivate mangosteen; 3) many yards that have not been utilized whereas they have potential and strategic location passed through Brantas river and primery road of Surabaya-Yogyakarta.

Keywords: Policy, Village, Featured Product

OPEN ACCESS

ISSN 2527-9246 (online)

ISSN 2338-445X (print)

*Correspondence:

Haryono
haryono@ubhara.ac.id

Citation:

H (2018) Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Mempersiapkan Produk Unggulan Wilayah Pedesaan Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Rumah. JKMP. 6:1. doi: 10.21070/jkmp.v6i1.1905

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui perencanaan kebijakan pemerintah desa Jabaran; 2) untuk mengetahui partisipasi masyarakat desa Jabaran dalam memanfaatkan pekarangan rumah; 3) untuk mengetahui daya dukung lahan pekarangan mendukung produk unggulan desa. Jenis penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara mendalam beberapa informan kunci para pihak terkait untuk mendapatkan data primer. Data sekunder dari pemerintah desa atau publikasi resmi pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa 1) Perencanaan kebijakan pemerintah desa untuk pembangunan desa telah berbasis UU No 6/2016 tentang Desa; 2) Partisipasi masyarakat desa Jabaran dalam memanfaatkan pekarangan rumah untuk menghasilkan produk tanaman dan hewan peliharaan masih terbatas, dan langkah nyata pemerintah desa Jabaran bersedia bersinergi dengan perguruan tinggi untuk budidaya tanaman Manggis; 3) Banyak lahan pekarangan yang belum

termanfaatkan, padahal memiliki daya dukung dan kekuatan wilayah, lokasi strategis dilewati sungai Brantas dan dilewati jalan poros Surabaya -Yogyakarta.

Keywords: Policy, Village, Featured Product

PENDAHULUAN

Lahan pekarangan memiliki struktur vegetasi sangat kompleks, memiliki fungsi multiguna dan sebagai bentuk praktik agrobisnis yang potensial. Lahan pekarangan menjadi jaring pengaman petani, penyelamat ekosistem dan sistem pengelolaan lahan dengan mensinergikan produksi dan konservasi jenis tanaman terancam punah, memiliki nilai ekonomis. [Galluzzi et al. \(2010\)](#) ; [Lais et al. \(2017\)](#) Lahan pekarangan juga memiliki fungsi sosial penting melalui pemberian hadiah produk pekarangan untuk silaturahmi, membantu pengobatan dan acara keagamaan. Lahan pekarangan memiliki konsep keberlanjutan sosial dalam dua kepentingan yaitu peran positif untuk memenuhi kebutuhan pada saat sekarang dan kemampuan untuk menanggapi perubahan sosial ekonomi masyarakat. [Putri et al. \(2010\)](#) ; [Rauf et al. \(2013\)](#) ; [Galhena et al. \(2013\)](#)

Lahan pekarangan memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan secara ekologi dan sosial dimana pohon, tanaman semusim, tanaman hias dan tanaman lainnya serta ternak dapat hidup secara bersama-sama. Meskipun lahan pekarangan relative sempit, namun dapat menghasilkan bahan pangan seperti umbi-umbian, sayur, buah-buahan, bahan tanaman rempah dan obat, bahan kerajinan tangan, bahan pangan hewani yang berasal dari unggas, ternak kecil, ikan, tanaman hias, bahan bangunan, kayu bakar dan pakan ternak. Manfaat yang diperoleh dari pengelolaan lahan pekarangan antara lain dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dan gizi keluarga, menghemat pengeluaran, dapat memberikan tambahan pendapatan keluarga. [Kusmiati and Solikhah \(2015\)](#) ; [Sukanata et al. \(2015\)](#) ; [Minarni et al. \(2017\)](#) ; [Nurwati et al. \(2015\)](#) ; [Siregar and Wahyuni \(2018\)](#)

Sebagian warga desa Jabaran, Balongbendo Kabupaten Sidoarjo mempunyai lahan pekarangan di sekitar rumah cukup luas, sehingga potensi pekarangan di desa tersebut sangat besar untuk dimanfaatkan. Pekarangan di desa Jabaran ditanami masyarakat dengan berbagai jenis tanaman pertanian dan hewan peliharaan, namun belum sampai pada tahap komersial bahkan menjadi produk unggulan desa Jabaran, seperti desa Kasongan, Yogyakarta yang memiliki produk unggulan desa berbasis gerabah. Informasi mengenai komposisi dan fungsi peranan tanaman, penyusun pekarangan sangatlah penting sebagai data pendukung dalam upaya perencanaan pemerintah desa Jabaran untuk peningkatan produktivitas pekarangan. (Balongbendo dalam Angka, 2017) Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui perencanaan kebijakan pemerintah desa Jabaran dalam mempersiapkan produk unggulan desa; 2) untuk mengetahui partisipasi masyarakat desa Jabaran dalam memanfaatkan pekarangan rumah mendukung dan mempersiapkan program produk unggulan desa; 3) untuk mengetahui daya dukung lahan pekarangan rumah penduduk mendukung produk unggulan desa.

Perencanaan Kebijakan Pemerintah Desa tentang Produk Unggulan Desa

Kebijakan otonomi desa memberikan wewenang kepada desa untuk mengatur dan mengurus kebutuhan masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah Kepala Desa, dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa memiliki kebijakan desa melekat dalam lembaga desa, sebagai perwujudan demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak, berdasarkan kesimpulan atau rekomendasi. Sebagai suatu proses, kebijakan menunjuk cara

suatu organisasi mengetahui program dan mekanisme dalam mencapai produknya, sebagai suatu kerangka kerja. Kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode. [ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik \(2012\)](#); [Abidin \(2012\)](#)

Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengembangan potensi ekonomi masyarakat, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan hasil riset, terutama dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan sosial masyarakat. [Mikkelsen \(2011\)](#); [Solekhan \(2012\)](#); [Kurniawan \(2015\)](#). Pemberdayaan masyarakat desa ditujukan mendorong terciptanya kekuatan dan kemampuan lembaga masyarakat untuk secara mandiri, mampu mengelola dirinya sendiri berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri, serta mampu mengatasi tantangan persoalan di masa yang akan datang. Pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan unsur utama yang harus dimiliki desa antara lain adalah: [9 \(2014\)](#); [Theresia et al. \(2014\)](#); 1) Wilayah dengan berbagai aspeknya, seperti lokasi, luas wilayah, bentuk lahan, keadaan tanah, kondisi tata air, dan aspek lainnya; 2) Penduduk dengan berbagai karakteristik demografis masyarakatnya, seperti jumlah penduduk, tingkat kelahiran, kematian, persebaran, dan kepadatan, rasio jenis kelamin, komposisi penduduk, serta kualitas penduduknya; dan 3) Tata kehidupan berkaitan erat dengan adat istiadat, norma dan karakteristik budaya lainnya.

Paradigma UU No 6/2016 tentang Desa saat ini, memberikan kesempatan pada pemerintah desa untuk mengelola potensi lokal di desanya sesuai dengan *local genius* yang dimiliki. Tujuan akhir dari pengembangan potensi lokal di desa tersebut pada hakikatnya dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat baik dengan diberikan bimbingan dan penyadaran oleh pihak desa, atau adanya usaha dari desa untuk menggugah kesadaran masyarakatnya menjadi masyarakat kreatif, terutama pemanfaatan lahan pekarangan lebih produktif, dalam mendukung produk unggulan desa. [Ashari et al. \(2012\)](#); [Susanto \(2014\)](#); [Wasistiono \(2007\)](#)

Partisipasi Masyarakat Pedesaan Memanfaatkan Pekarangan Rumah Mendukung dan Mempersiapkan Program Produk Unggulan Desa

Pembangunan pedesaan diarahkan kepada kegiatan pengembangan secara terpadu dan menyeluruh dengan cara memperdayakan setiap komponen dimasyarakat dalam rangka meningkatkan pengembangan masing-masing desa. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa dibutuhkan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Paradigma pembangunan saat ini adalah paradigma pemberdayaan berintikan partisipasi masyarakat. Pembangunan partisipatif dimulai dengan masyarakat memiliki aspirasi dan mengetahui kebutuhannya. Program pembangunan partisipatif mengamanatkan adanya pelibatan masyarakat secara aktif pada setiap tahapan kegiatan, mengarah pada pendekatan pembangunan *top down* dan *bottom up*. Partisipasi masyarakat berkaitan dengan proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Partisipasi keterlibatan mental, fisik dan emosional orang dalam kelompok untuk memberikan kontribusinya kepada tujuan kelompok dan berbagi tanggungjawab untuk mencapai tujuan, terdapat aktivitas keterlibatan, kontribusi dan tanggungjawab. [Fitryani and Yakub \(2017\)](#); [Soetomo \(2012\)](#); [Laksana \(2013\)](#)

Dimensi dan fase partisipasi, antara lain identifikasi masalah, pengumpulan informasi, perencanaan kegiatan, mobilisasi sumber, pelaksanaan, pembagian keuntungan, pemantauan dan evaluasi kegiatan. Partisipasi sebagai bentuk cerminan tindakan seseorang disumbangkan pada suatu kegiatan tertentu.

Ada 6 (enam) bentuk dari partisipasi, yaitu (1) partisipasi pikiran, (2) partisipasi tenaga, (3) partisipasi pikiran dan tenaga, (4) partisipasi materi, (5) partisipasi keahlian, (6) partisipasi uang. Partisipasi masyarakat mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan untuk meningkatkan pembangunan desa, dalam rangka mewujudkan kepentingan atau kebutuhan masyarakat desa tersebut terutama dalam mendukung program produk unggulan desa berbasis pekarangan rumah. [Sutisna \(2013\)](#); [Imtihan et al. \(2017\)](#)

Pengembangan produk unggulan desa melalui proses membangun dialog dan kemitraan

aksi yang meliputi pemerintah desa, masyarakat, dan para pihak terkait. Pilar-pilar pokok strateginya adalah meningkatkan daya tarik, daya tahan, dan daya saing ekonomi desa. Produk Unggulan Daerah (PUD) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 merupakan produk, berupa barang maupun jasa, dihasilkan koperasi, usaha skala kecil dan menengah, potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, manusia dan budaya lokal, yang mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah, diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar. [Pertanian \(2010\)](#) ; [Ratmono et al. \(2016\)](#)

Tataran pengembangan dilakukan berdasarkan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan. Perencanaan pengembangan PUD jangka menengah daerah melalui model; Inkubator, Klaster, *One Village One Product*, dan Kompetensi inti. Model pengembangan PUD jangka menengah melalui: 1. Peningkatan kualitas daya tarik PUD; 2. Peningkatan kualitas infrastruktur; 3. Peningkatan promosi dan investasi PUD; 4. Peningkatan kerjasama; 5. Peningkatan peran serta masyarakat; dan 6. Peningkatan perlindungan terhadap PUD. Proses mengembangkan konsep produk unggulan dilakukan dengan mengidentifikasi produk unggulannya terutama yang berasal dari sektor informal dan usaha kecil menengah dengan asumsi sifatnya padat karya sebagai proses pengembangan sumber daya lokal dan optimalisasi atas potensi ekonomi desa, serta relatif lebih mandiri dalam pengembangan ekonomi desa. [Sandriana et al. \(2015\)](#); [Badrudin \(2012\)](#)

Daya Dukung Lahan Pekarangan Rumah Mendukung Produk Unggulan Desa

Lahan pekarangan merupakan agro-ekosistem mempunyai potensi kalau dikembangkan secara baik dapat mensejahterakan masyarakat sekitar, pemenuhan kebutuhan pasar. Daya dukung lahan pekarangan merupakan daya tampung maksimum lingkungan untuk diberdayakan, tanpa menimbulkan degradasi sumberdaya menyangkut aspek fisik, lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya. Keberlanjutan daya dukung lahan sangat ditentukan oleh pengelola lahan dan proses geomorfologi yang terjadi berupa alih fungsi lahan. Penggunaan lahan dinamis mempunyai kecenderungan merubah factor topografi, tanah, dan batuan, hidrologi dan vegetasi. [Widyawati and Rizal \(2015\)](#)

Perubahan tersebut ditentukan oleh kebutuhan hidup manusia. Bentuk penggunaan lahan pada dasarnya adalah wujud nyata dari proses interaksi yang terjadi antara aktivitas-aktivitas manusia dan sumberdaya lahan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidupnya. Faktor yang menentukan daya dukung lahan pada suatu desa yaitu total area lahan pertanian, frekuensi panen/hektar/tahun, jumlah kepala keluarga, persentase jumlah penduduk, ukuran rata-rata lahan pertanian yang dimiliki petani. Potensi manfaat diukur dengan harkat kemampuan biofisik, kesesuaian ekonomi, keselarasan sosial, kelayakan bisnis. Lahan pekarangan dapat menjadi pilihan cerdas dengan paradigma baru lahan pekarangan menjadi lokasi usaha komersial keluarga dan menghasilkan produk unggulan desa. [Sofianto \(2012\)](#)

Lahan pekarangan memiliki berbagai fungsi di samping sebagai fungsi sosial, fungsi produksi komersial, fungsi estetika, pengawetan tanah dan sumber daya genetik atau fungsi pencargan sumber daya pangan. Dengan terjadinya pergeseran orientasi pengusahaan penggunaan lahan pekarangan kearah komersialisasi menyebabkan banyak hasil tanaman pekarangan dijual untuk menambah pendapatan guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang pendapatan perekonomiannya masih rendah. Beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan pendapatan dari pemanfaatan pekarangan dalam perekonomian masyarakat pedesaan bahkan dapat mendukung produk unggulan desa. [Mulyanto \(2011\)](#) ; [Lais et al. \(2017\)](#) ; [Sukanata et al. \(2015\)](#) ; [Nurwati et al. \(2015\)](#) ; [Susanto \(2014\)](#) ; [Kurniawan \(2015\)](#) ; [Ratmono et al. \(2016\)](#)

METODE PENELITIAN

Fokus dan jenis penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran menyangkut kebijakan pemerintah desa Jabaran dalam mempersiapkan produk unggulan wilayah desa melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan rumah penduduk. Data sekunder diperoleh dari ketersediaan informasi dari pemerintah desa Jabaran guna mendukung tujuan penelitian, demikian juga untuk data primer diperoleh dari observasi dan wawancara mendalam dari beberapa informan kunci antara lain pemerintah desa yang diwakili oleh Sekretaris Desa, BPD, LPMD, RT/RW, Karang Taruna, diskusi akademisi (peneliti sebagai *key informan*) dan para pihak terkait yang sudah ditunjuk dengan pertimbangan memiliki kompetensi dan kewenangan dalam memberikan informasi atau data yang dilakukan. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Singarimbun and Effendi (2008); Chambers (1994); Augusta (2014); Pitono and Kartiwi (2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis situasi desa Jabaran, Balongbendo Kabupaten Sidoarjo

Desa Jabaran salah satu dari 20 desa di wilayah Kecamatan Balongbendo, yang terletak \pm 2 km dari kota Kecamatan dan 24 km dari kota Kabupaten. Secara umum desa Jabaran memiliki batas-batas sebagai berikut : (Balongbendo, 2017): a) Sebelah utara berbatasan dengan desa Balongbendo; b) Sebelah selatan berbatasan dengan desa Watesari; c) Sebelah timur berbatasan dengan Watesari; d) Sebelah barat berbatasan dengan Suwaluh dan Wiringinpitu

Dengan luas wilayah 1,24 km² dan jumlah penduduk sebanyak 2.719 jiwa tinggal di 3 pedusunan dapat menghasilkan produksi padi sebesar 204 ton. Pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat desa Jabaran dengan menanam pohon Mangga, Belimbing, Jambu Air, Jambu Biji, Pisang, Kunyit, Temulawak, Lamtoro, Gayam, Ayam, Itik, Sapi, Kambing, Domba dan Manggis. Untuk membangun desa Jabaran, tahun 2018 teralokasi Dana Belanja Desa sebesar Rp. 1.525.881.786 untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat, dan dana tidak terduga. (Pemerintah Desa Jabaran, 2018)

Perencanaan kebijakan pemerintah desa Jabaran dalam mempersiapkan produk unggulan desa

Dinamika kebijakan pada level pemerintahan desa akan selalu berubah sesuai dengan kepentingan masyarakat atau mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa yang ada. Sofianto (2012) Wilayah pedesaan dengan kegiatan utama penduduknya di sektor pertanian digambarkan sebagai wilayah pinggiran jauh dari kota, dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya *nrimo ing pandum* jika dibandingkan dengan kondisi situasi wilayah kota, demikian menurut Ismail, S.Sos., M.Si Dosen FISIP Ubhara sebagai *key informan*, pendekatan kaum akademis, selengkapnya sebagai berikut :

“Setiap kebijakan pemerintah desa harus ada tujuannya, artinya pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekadar asal buat atau karena kebetulan, ada kesempatan membuatnya. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, atau terpisah dari kegiatan yang lain. Namun, ia berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada implementasi, interpretasi dan ... peningkatan pendapatan masyarakat desa... Dalam perencanaan kebijakan pemerintah desa harus bersifat transparansi atau terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti melalui musyawarah desa (Musrendes). ...Selain itu, dalam perencanaan kebijakan desa harus memiliki akuntabilitas tinggi artinya menggunakan dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan desa dalam hal ini yang tepat berbasis UU No 6/2016 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Produk Unggulan Daerah....(diskusi, 27 Juni 2018)

Desa sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya melaksanakan proses pembangunan (Nuruzzaman, 2016) Nuruzzaman (2016). Kepala Desa sebagai pemerintahan tingkat terendah dapat menyentuh langsung dengan masyarakat melalui musyawarah desa diharapkan lebih berperan dalam terlaksananya pembangunan desa, berikut ini petikan wawancara dengan Sekretaris Desa Jabaran:

“Pemerintah Desa Jabaran setiap awal tahun selalu mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musdes) bersama lembaga yaitu BPD, LPMD, RT/RW, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat dengan beberapa tahapan yaitu : 1) Penyusunan RPJMDes dilakukan dengan melalui tahapan pembahasan materi mengkaji kondisi desa ; 2) Membahas sumber pembiayaan rencana pelaksanaan kegiatan tersebut ; 3) Memutuskan penetapan RPJMDes Desa. (wawancara, 2 Juli 2018)

Pernyataan Sekretaris Desa Jabaran tersebut dibenarkan oleh perangkat desa yang lain dari tingkat dusun, RW/RT, Karang Taruna, Ibu PKK. Selanjutnya, berdasarkan hasil musyawarah desa dilanjutkan aktivitas pembangunan sesuai kesepakatan, selanjutnya dimonitoring dan evaluasi agar tercapai tujuan pembangunan desa. Kegiatan pembangunan desa dapat menggunakan tahun jamak atau cukup dikerjakan 1 tahun disesuaikan kebutuhan program dan ketersediaan dana yang dimiliki oleh desa setempat.

Partisipasi masyarakat desa Jabaran dalam memanfaatkan pekarangan rumah mendukung dan mempersiapkan program produk unggulan desa

Pembangunan di wilayah pedesaan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan yang semakin memantapkan ketahanan masyarakat dalam upaya meletakkan dasar dan landasan ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan dan ketahanan pangan nasional. Menurut Dr. Haryono, SE. M.Si, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya yang juga sekaligus sebagai *key informan* berpendapat berikut :

“Pembangunan pedesaan diarahkan kepada kegiatan pengembangan secara terpadu dan menyeluruh dengan cara memperdayakan setiap komponen di masyarakat dalam rangka meningkatkan pengembangan setiap desa. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa dibutuhkan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. paradigma pemberdayaan yang berintikan partisipasi masyarakat. Masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama pembangunan dan pemerintah tidak lagi sebagai provider, tetapi lebih bertindak sebagai intermediasi dan katalisator segenap perencanaan pembangunan, pemerintah desa dapat memberikan kepercayaan dan kesempatan lebih banyak kepada masyarakat, sehingga dapat menumbuhkan kembangkan segala potensi dimilikinya bersama dengan lingkungannya. Usulan produk unggulan desa Jabaran adalah budidaya pohon Manggis karena menghasilkan beberapa produk turunan selain rasa buah Manggis yang menyegarkan” (diskusi, 27 Juni 2018)

Pembangunan partisipatif harus dimulai dengan masyarakat sebagai manusia yang memiliki aspirasi dan paling mengetahui tentang kebutuhannya. Partisipasi dalam masyarakat luas mutlak diperlukan, oleh karena mereka itulah yang pada akhirnya melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan, rakyat banyak memegang peranan sekaligus sebagai objek dan subjek pembangunan. Purwaningsih (2008)

Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah daerah harus dapat memposisikan diri sebagai fasilitator untuk menciptakan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat yang diharapkan dapat mendukung keberhasilan pembangunan desa Adisasmita (2006) ; Imtihan et al. (2017). Mendorong peran serta masyarakat dalam mendorong tumbuh kembang produk unggulan desa Jabaran perlu memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat terutama memanfaatkan kegiatan sela untuk ibu PKK dan Karang Taruna desa Jabaran. Berkaitan dengan partisipatif masyarakat dalam mendukung program produk desa unggulan berbasis pohon Manggis tokoh BPD ibu Hj. Siti Tavipah menyatakan

“Saya siap menggerakkan ibu PKK desa Jabaran yang memiliki lahan dan ketersediaan air untuk pemeliharaan bibit pohon Manggis, ...*lha wong atase mek siram siram ae...banyu yo akeh...sing penting onok sing diumek mari diumek dadi duwek, tapi tolong penduduk Jabaran yo pean bimbing carane budidaya sampek dodolan.e* (lha cuma menyiram saja, air

melimpah...yang penting ada kegiatan yang menghasilkan uang tapi mohon masyarakat desa Jabaran dibimbing cara budidaya sampai penjualannya)” (wawancara, 2 Juli 2018)

Pekarangan sebagai lumbung hidup, warung hidup atau apotik hidup. Dalam kondisi tertentu, pekarangan dapat memanfaatkan kebun di sekitar rumah, sehingga kegiatan pemanfaatan pekarangan dapat memadukan beberapa usaha pertanian secara terpadu. Wanita sebagai ibu rumah tangga merupakan tulang punggung keluarga dalam penyediaan pangan rumah tangga sangatlah perlu memegang peran aktif yang sangat besar dalam pemanfaatan pekarangan. yang dimilikinya dalam mengatur ketersediaan pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi di tingkat rumah tangga. Nurwati et al. (2015) ; Sukanata et al. (2015) ; Aslamiah et al. (2016)

Daya dukung lahan pekarangan rumah penduduk dalam mendukung produk unggulan desa

Luas lahan pekarangan juga akan mempengaruhi jenis tanaman yang diusahakan, dimana luas lahan yang dimiliki semakin lama semakin berkurang karena adanya fragmentasi lahan akibat pembagian warisan sehingga harus menggunakan strategi yang tepat untuk budidaya lahan pekarangan. Siregar and Wahyuni (2018) . Lahan pekarangan rumah merupakan salah satu lahan potensial yang sering dilupakan penggunaannya. Pemanfaatan pekarangan rumah dengan menanamnya dengan tanaman yang berjual nilai tinggi dapat meningkatkan pendapatan keluarga petani. Kusmiati and Solikhah (2015); Haerudin (2010) Untuk mendapatkan hasil dan produktivitas yang tinggi harus dilaksanakan dengan teknik budidaya yang tepat. Menurut Endang Siswati, DBA dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya, yang sekaligus sebagai *key informan* menyatakan bahwa

“Pada lahan pekarangan dapat dilakukan usaha tani yang bersifat komersial, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani. Salah satunya adalah menanam tanaman buah. Untuk itu, perlu dilakukan kegiatan pendidikan dan pendampingan pada petani untuk mau menanam tanah pekarangannya dengan tanaman pohon Manggis sebagai komoditas bernilai ekonomi. Limbah kulit buah Manggis apabila dalam jumlah besar dapat dimanfaatkan sebagai obat setelah dilakukan sentuhan teknologi ...kayaknya banyak manfaatnya.... minuman teh dari kulit buah Manggis sudah... kalau kopi dari kulit buah Manggis...wah itu pasti seru dan menjadi tantangan bagi kaum akademis untuk menguji kandungan sampai dengan standarisasi produk (diskusi, 27 Juni 2018)

Dalam hal kearifan lingkungan masyarakat berperan penting dalam memilih jenis tanaman yang diusahakan baik ditinjau dari manfaat ekonomi, sosial, budaya, keagamaan dan keindahan. Tanaman produksi di lahan pekarangan seperti tanaman pangan, buah-buahan dan sayur-sayuran, hasilnya dapat dimanfaatkan sendiri maupun dijual sehingga dapat memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat. Widyawati and Rizal (2015) Minarni et al. (2017) Berkaitan dengan peluang budidaya bibit Manggis sebagai awalan kegiatan menuju produk unggulan desa Jabaran menurut Ir. Achmad Pribadi dan Ir. Abdul Gofur praktisi budidaya produk pertanian tinggal di Jabaran Balongbendo dalam diskusi menyatakan :

“Pengembangan produk unggulan desa berbasis buah Manggis sangat tepat karena cukup melakukan proses menyiram saat pagi dan sore, sebagaimana di jual di area persimpangan lampu merah atau sepanjang jalan poros Surabaya-Madiun sehingga produk unggulan desa berbasis buah Manggis dapat memenuhi kaidah efektif, efisiensi dan memiliki nilai ekonomis tinggi, ramah lingkungan serta banyak keuntungan yang lainnya. Selain daging buah Manggis yang dapat dikonsumsi menyegarkan, kulit buah Manggis bisa termanfaatkan, setelah kering dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam penyembuhan penyakit yang berbahan baku organik dalam bentuk teh atau kopi kulit Manggis...bahkan daun pohon Manggis bila disuling dapat menghasilkan minyak atsiri daun Manggis dengan harga yang mahal... demikian banyak manfaat pohon Manggis sehingga sangat cocok untuk menjadi produk unggulan desa Jabaran ...Icon e Jabran yo Manggis...Manggis yo Jabaran gak iyo a (dialog khas Balongbendo)” (wawancara, 2 Juli 2018)

Ir. Abdul Gofur, sangat senang meskipun mengingatkan bahwa tanah di desa Jabaran ini berupa tanah delta, perlu mendapatkan perhatian tentang rekayasa tanah dan pola tanam.

KESIMPULAN

Perencanaan Kebijakan Pemerintah Desa tentang Produk Unggulan Desa, Perencanaan kebijakan pemerintah desa untuk pembangunan desa telah berbasis UU No 6/2016 tentang Desa. Sudah ada beberapa produk tumbuhan dan hewan peliharaan sesuai potensi desa, namun belum dioptimalkan terutama dengan memanfaatkan lahan pekarangan menghasilkan produk komersial sekaligus menjadi produk unggulan desa Jabaran.

Partisipasi Masyarakat Pedesaan Memanfaatkan Pekarangan Rumah Mendukung dan Mempersiapkan Program Produk Unggulan Desa, Partisipasi masyarakat desa Jabaran dalam memanfaatkan pekarangan rumah untuk menghasilkan produk tanaman dan hewan peliharaan masih terbatas, belum ada kegiatan produk komersial yang terencana mendukung produk unggulan desa. Masyarakat desa Jabaran sangat mendukung dan siap berpartisipasi terhadap rencana kerja dan langkah nyata pemerintah desa Jabaran bersinergi dengan perguruan tinggi.

Daya Dukung Lahan Pekarangan Rumah Mendukung Produk Unggulan Desa. Banyak lahan pekarangan yang belum termanfaatkan, padahal memiliki daya dukung dan kekuatan wilayah, karena desa Jabaran memiliki lokasi strategis dilewati sungai Brantas berarti tersedia air berlimpah, sangat cocok untuk pengembangan produk pertanian skala komersial. Untuk kegiatan pasca panen memiliki potensi besar untuk dikomersialisasikan karena secara kebetulan dan simultan juga dilewati jalan poros dari Surabaya-Madiun-Solo-Yogyakarta atau menuju kota antar propinsi dan kota antar kabupaten besar lainnya dan atau sebaliknya.

REFERENCES

- 9, P. M. D. N. N. (2014). Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah.
- Abidin, S. Z. (2012). Kebijakan Publik (Jakrta: Salemba Humanika).
- Adisasmita, R. (2006). Membangun Desa Partisipatif (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Agusta, I. (2014). Indeks Kemandirian Desa Metode, Hasil dan Alokasi Program Pembangunan (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor).
- Ashari, Saptana, and Purwantini, T. B. (2012). Potensi dan Prospek Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Mendukung Ketahanan Pangan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 30, 13–20.
- Aslamiah, S., Afifah, I., and Mariaty (2016). Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Wanita Dalam Pemanfaatan Lahan Pekarangan Dengan Tanaman Obat Keluarga. *Jurnal PengabdianMu* 1, 97–103.
- Badrudin, R. (2012). Model Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dengan One Village One Product untuk Mengurangi Kemiskinan di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional*, ed. and others (Yogyakarta: SEMINAR NASIONAL DAN CALLFOR PAPERPENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI UMKM: KOMPARASI MODEL-INDONESIA DAN MALAYSIA).
- Chambers, R. (1994). Participatory Rural Appraisal (PRA) : Analysis of Experience. *World Development* 22, 1253–1268.
- Fitryani, V. and Yakub, M. (2017). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Pernek Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 14, 77–94.
- Galhena, D. H., Freed, R., and Maredia, K. M. (2013). Home gardens: A Promising Approach to Enhance Household Food Security and Wellbeing. *Journal Agriculture and Food Security* 2.
- Galluzzi, G., Eyzaguirre, P., and Negri, V. (2010). Home gardens: neglected hotspots of agro-biodiversity and cultural diversity. *Biodivers Conserv* 19, 3635–3654.
- Haerudin (2010). Pemanfaatan Lahan Pekarangan Sebagai Tambahan Pendapatan Ekonomi Masyarakat di Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Education* 5.
- Imtihan, H., Wahyunadi, and Firmansyah, M. (2017). Peran Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang Ds. Taman Sari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat 2016). *Jurnal Neo-Bis* 11, 1–10. doi: <https://doi.org/10.21107/nbs.v1i1.2952>.
- ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik, A. K. D. F. (2012). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik (Jakarta: Bumi Aksara).
- Kurniawan, B. (2015). Desa Mandiri, Desa Membangun (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia).
- Kusmiati, A. and Solikhah, U. (2015). Peningkatan Pendapatan Keluarga Melalui Pemanfaatan Pekarangan Rumah Dengan Menggunakan Teknik Vertikultur. *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan* 4, 94–101. doi: <http://journal.uui.ac.id/index.php/ajie>.
- Lais, H., A.Pangemanan, P., and SherlyG.Jocom (2017). Pemanfaatan Pekarangan Keluarga Petani di desa Paralele, Kecamatan Tatoareng, Kabupaten Kepulauan Sangehe. *Jurnal Agri-Sosio Ekonomi* 13, 373–384.
- Laksana, N. S. (2013). Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Program Desa Siaga. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* 1, 56–67.
- Mikkelsen, B. (2011). Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia).
- Minarni, E. W., Minarni, E. W., Prihatiningsih, N., and Prihatiningsih, N. S. D. (2017). Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Dengan Budidaya Sayuran Organik Dataran Rendah Berbasis Kearifan Lokal Dan Berkelanjutan. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 1, 147–154.
- Mulyanto, D. (2011). Ekonomi Pekarangan di Pedesaan Jawa. *Jurnal Komunitas* 3, 19–28. doi: <https://doi.org/10.15294/>

- komunitas.v3i1.2289.
- Nuruzzaman, M. (2016). Pola Komunikasi Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Menyusun dan Mengimplementasikan Program Pembangunan Desa. *Jurnal Logika* 28.
- Nurwati, N., Lidar, S., and Mufti (2015). vModel Pemberdayaan Pekarangan di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. *Jurnal Agribisnis* 17, 1–10.
- Pertanian, K. (2010). Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP (Jakarta: Pusat Pembiayaan Pertanian Kanpus Kementerian Pertanian.).
- Pitono, A. and Kartiwi (2016). Penguatan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Menuju Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Politikologi* 3, 27–37.
- Purwaningsih, E. (2008). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Jantra* 3, 443–452.
- Putri, H. M., Asnawi, and Hikmayani, Y. (2010). Pemanfaatan Lahan Pekarangan Sebagai Bentuk Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Budidaya Lele. *Jurnal Bijak dan Riset Sosek* 5, 159–167. doi: <http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v5i2.5798>.
- Ratmono, Hendri, N., and Yateno (2016). Pendekatan OVOP Sebagai Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Kota Provinsi Lampung. *Jurnal Derivatif* 10, 82–90. doi: 10.24127/jm.v10i2.113.
- Rauf, A., Rahmawaty, and Said, D. B. T. (2013). Sistem Pertanian Terpadu Di Lahan Pekarangan Mendukung Ketahanan Pangan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan. *Jurnal Online Pertanian Tropik Pasca Sarjana* 1, 1–8.
- Sandriana, N., Sandriana, N., and Saleh, C. (2015). Strategi Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Klaster di Kota Malang. *Jurnal Reformasi* 5, 89–100. doi: <http://dx.doi.org/10.33366/rfr.v5i1.66>.
- Singarimbun, M. and Effendi, S. (2008). Metode Penelitian Survei (Jakarta: LP3ES).
- Siregar, N. N. and Wahyuni, S. (2018). Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Sebagai Sumber Pangan. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, 146–149.
- Soetomo (2012). Pembangunan Masyarakat (Pustaka Pelajar: Yogyakarta).
- Sofianto, A. S. D. (2012). Model pembangunan Desa Terpadu Inovatif di Jawa Tengah. *Jurnal Bina Praja* 4, 251–260.
- Solekhan, M. (2012). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Malang: Setara Pers).
- Sukanata, I. K., Budirokhaman, D., and Nurmaulana, A. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Dalam Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari. *Jurnal Agrijati* 28, 1–16.
- Susanto, H. (2014). Kajian Komoditas Unggulan, Andalan dan Potensial di Kabupaten Grobogan,. *Journal of Rural and Development* 5, 63–80.
- Sutisna, W. P. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Masyarakat di Daerah. *Jurnal Desentralisasi* 11, 419–432.
- Theresia, A., S.Andini, K., Nugraha, P. G., and Mardikanto, T. (2014). Pembangunan Berbasis Masyarakat (Bandung: Penerbit Alfabeta).
- Wasistiono (2007). Prospek Pengembangan Desa (Bandung: Fokus Media).
- Widyawati, A. T. and Rizal, M. (2015). Potensi Pengembangan Tanaman Sayuran Skala Rumah Tangga di Samarinda, Kalimantan Timur. *Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon* 1, 1877–1883. doi: 10.13057/psnmbi/m010821.

Conflict of Interest Statement: The author declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2018 Author. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.